

**Judul** : Masukan dari Masyarakat, Sempurnakan DIM RUU TPKS  
**Tanggal** : Sabtu, 05 Februari 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

## Masukan dari Masyarakat, Sempurnakan DIM RUU TPKS

PEMERINTAH mengajak koalisi masyarakat sipil dan akademisi bersama-sama memberi masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Saya meyakini dengan diskusi publik rumusan DIM RUU TPKS akan menjawab segala persoalan terkait kekerasan seksual,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Ia juga meminta semua pihak ikut mengawal RUU TPKS agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang dengan pasal-pasal yang menjawab keadilan bagi korban. Saat ini Tim Gugus Tugas percepatan RUU TPKS telah merumuskan 623

DIM sebagai respons atas penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Ketua tim gugus tugas RUU TPKS, Eddy O.S Hiariej, menyatakan banyak substansi baru dalam DIM RUU TPKS. Untuk menyempurnakan substansi DIM yang akan menjadi lampiran surat Presiden ke DPR, lanjutnya, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Tim Gugus Tugas RUU TPKS menggelar diskusi publik dengan melibatkan koalisi masyarakat sipil dan akademisi.

Hadir pada acara itu lebih dari 80 perwakilan masyarakat sipil dan akademisi.

“Unggulan DIM RUU TPKS, ada pada hukum acara yang sangat progresif dan *advance*. Sebelumnya dari ribuan kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan,

penyelesaiannya kurang dari 5%.

Berarti ada masalah pada hukum acaranya. Nah, ini yang diperbaiki,” tambah Wakil Menteri Hukum dan HAM itu lagi.

Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, menambahkan kementerian/ lembaga telah menyiapkan skema tindak lanjut untuk mendukung implementasi RUU TPKS ke depan.

**Unggulan DIM  
RUU TPKS ada  
pada hukum  
acara yang  
sangat progresif  
dan *advance*.**

“Skema itu, di antaranya kajian pembentukan direktorat khusus, untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kejaksaan Agung, Polri, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai *one-stop service* bagi korban kekerasan seksual,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, mengatakan pihaknya terbuka terhadap semua masukan untuk menyempurnakan DIM RUU TPKS.

Sebagai *leading sector* mewakili Presiden dalam penyusunan pandangan pemerintah dan DIM RUU TPKS, lanjutnya, Kemen PPPA sedang mengupayakan penyusunan DIM yang komprehensif dan optimal sehingga dapat menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat terkait kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Di sisi lain, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya memastikan pembahasan RUU TPKS akan tetap dilaksanakan meski telah diberlakukan pembatasan rapat tatap muka (*lockdown*) sementara oleh Ketua DPR. (Far/Sru/Ant/X-7)